

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke	: 14 (empatbelas)
Masa Persidangan	: V
Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Jenis Rapat	: Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I dan menghadirkan KPI, KIP dan Dewan Pers
Hari, Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: a. Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo Tahun 2023; b. Isu-isu Aktual.
Hadir	: 1. ... dari 52 Anggota Komisi I DPR RI 2. a. Menteri Komunikasi dan Informatika R.I., Johnny G. Plate; b. Ketua KPI, Agung Suprio; c. Ketua KI Pusat, Donny Yoegiantoro; d. Wakil Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra; beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I., dan menghadirkan KPI, KIP dan Dewan Pers pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menkominfo terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemkominfo dengan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023 sebesar Rp 18.451.104.938.000 (delapan belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp. 12.781.817.966.000,- (dua belas triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
 - b. Program Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 2.576.630.284.000,- (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - c. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp. 1.201.015.437.000,- (satu triliun dua ratus satu miliar lima belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - d. Program komunikasi publik sebesar Rp. 295.106.475.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - e. Program dukungan manajemen sebesar Rp. 1.596.534.775.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua KPI, Ketua KI Pusat, dan Ketua Dewan Pers terkait dengan Pagu Indikatif RAPBN TA 2023, yaitu;
 - a. KPI Pusat sebesar Rp. 60.220.079.000,- (enam puluh miliar dua ratus dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - b. KI Pusat sebesar Rp. 40.047.604.000,- (empat puluh miliar empat puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah)
 - c. Dewan Pers sebesar Rp. 44.295.399.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
3. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menkominfo terkait adanya kekurangan anggaran TA 2022 Kemkominfo sebesar Rp 20,5 Triliun yang belum diakomodasi pada pagu indikatif TA 2023 terkait dengan program percepatan transformasi digital nasional. Untuk selanjutnya, Komisi I DPR RI akan meneruskan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk:
 - a. mengintensifkan sosialisasi migrasi *Analog Switch Off* (ASO) dan *monitoring* pendistribusian *Set Top Box* (STB) ke semua lapisan masyarakat yang berhak menerima sehingga pelaksanaan migrasi dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan
 - b. memastikan bahwa pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah yang sudah ditetapkan, dibarengi dengan aktivasi sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2022

1. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I.

KETUA RAPAT,

JOHNNY G. PLATE

DR. H.ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442

2. KETUA KPI

AGUNG SUPRIO

3. KETUA KI PUSAT

DONNY YOEGIANTORO

4. KETUA DEWAN PERS

AZYUMARDI AZRA